BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi masyarakat hukum adat marga serampas dapat dikatakan masih ada karna pemenuhan terhadap unsur unsur dalam Peraturan Menteri Agraria No 5 Tahun 1999 Mengenai Keberadaan Persekutuan Masyarakat Adat , batas tanah sampai kepada fungsionaris adat dan juga pengakuan terhadap masyarakat hukum adat marga serampas pada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas serta ketetapan pada keputusan menteri LHK Nomor6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang penetapan hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat marga serampas sampai saat ini masih belum mendapatkan titik terang meskipun dalam pengaturannya masyarakat hukum adat marga serampas sudah cukup bukti dengan berbagai peraturan per undang undangan akan tetapi belum terselesaikan karna kurangnya pengawasan ataupun tindak lanjut terhadap sengketa ini dan perlindungan hukum atas pemanfaatan itu sendiri juga di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Seharusnya pemerintah bisa lebih serius menanggapi persoalan persengketaan yang ada dikarenakan bukti bukti tentang pengakuan dan perlindungan yang sudah cukup jelas sehingga memudahkan untuk menjalani proses yang sedang berlangsung sehingga dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan terhadap tanah adatnya.
2. Perlu adanya pengawasan terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung sampai kepada proses peninjauan lapangan yang menjadi objek sengketa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A .Bazaar Harahap, *Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan*, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015
- A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Dyah Ayu Widowati, dkk, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Yogyakarta : Amongkarta, 2014.
- Dewi Wulansari, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju. 2003.
- I Gede AB Wiranataa, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2011